

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada awal mulanya merupakan kepulauan yang tidak bertuan serta berpenghuni yang berada di Laut China Timur, dan tidak lain adalah kepulauan kosong hingga tidak ada satupun pihak yang melirik terhadap kepulauan tidak berpenghuni tersebut, Total luas daratan seluruh kepulauan Senkaku/Diaoyu diperkirakan 6,3 km², dengan kepulauan terbesar, adalah kepulauan Uotsuri, yang berukuran sekitar 3,81 km² dan letak geografis dari kepulauan Senkaku/Diaoyu yaitu 175 km dari utara Pulau Yaeyama di Prefektur Okinawa, 190 km dari timur laut Taiwan, dan 420 km dari China timur (Jannah Zahrotul Agustina, 2022). Sehingga pada tahun 1885 Kekaisaran Jepang pada era Meiji melakukan survei terhadap wilayah tersebut lalu pihak Kekaisaran Jepang mulai memasukan kepulauan Senkaku/Diaoyu menjadi bagian dari Jepang, karena tidak adanya kepemilikan dan ketertarikan dari pihak lain pada wilayah tersebut berdasarkan landasan hukum *terra nullius* (Tanah/wilayah tanpa kepemilikan).

Tindakan Jepang yang telah memasukan kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai wilayahnya menurut catatan sejarah dari pemerintah Jepang, terjadi sebelum terciptanya era peperangan antara Kekaisaran Meiji (Jepang) dengan Dinasti Qing (China) pada tahun 1894 hingga 1895 yang berujung dimenangkan oleh Kekaisaran Jepang lalu dari peperangan tersebut melahirkan perjanjian Shimonoseki yang berisi persetujuan pihak China dalam menyerahkan sejumlah wilayahnya terhadap Jepang yang salah satunya semenanjung kepulauan yang sekarang bernama Taiwan dan kepulauan disekitarnya.(Muliatama Rizky Dinar, 2016)

Salah satu mulainya konflik persengketaan teritorial ini diduga dengan diawalinya ketertarikan China yang secara terang – terangan semakin kuat karena hasil dari penelitian sumber daya alam yang dilakukan oleh UNCAFE (*United Nation Committe for Asia and Far East*) sebagai badan penelitian PBB pada tahun 1969 – 1970an. Yang menyatakan bahwa kepulauan Senkaku/Diaoyu memiliki potensi sumber daya alam mineral yang melimpah seperti gas dan minyak bumi. Sehingga atas kasus tersebut memicu implikasi konflik diantara Jepang dan China dengan adanya kepentingan nasional masing – masing negara berdasarkan nilai strategis dari Kepulauan Senkaku/Diaoyu, dan juga karena besarnya potensi sumber daya alam, hingga akan menguntungkan bagi siapapun diantara kedua negara tersebut yang memilikinya. Meskipun secara bukti legal Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari kedaulatan Jepang namun hal tersebut tidak mencegah China dalam sikap asertifnya dalam mengklaim Kepulauan Senkaku/Diaoyu. (Jannah Zahrotul Agustina, 2022)

Awal konflik persengketaan terjadi, dimulai dengan adanya pengembaliannya wilayah Taiwan oleh Jepang kepada China tepatnya pada pasca perang dunia ke II melalui Perjanjian Perdamaian *San Fransisco*, yang dimana Taiwan sebelumnya masuk sebagai wilayah yuridiksi Okinawa yang pada saat itu berada dibawah kekuasaan AS karena kekalahan Jepang terhadap AS, dan dengan itu melalui perjanjian pengembalian Okinawa dari AS kepada Jepang sebagai bagian dari wilayah hak administratifnya Jepang. Jepang juga mengembalikan Taiwan kepada China pada tahun 1972, namun Jepang tidak pernah menyatakan bahwa pengembalian Taiwan kepada China juga termasuk kepulauan Senkaku/Diaoyu, karena pemerintah Jepang menyatakan bahwa kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan bagian dari wilayahnya yang dimasukan sebelum terlahirnya perjanjian Shimonoseki antara Kekaisaran Meiji (Jepang) dan Dinasti Qing (China) maka dari itu Semua fakta ini dapat memperkuat hak kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi bagian konsisten dari wilayah Jepang dalam tatanan internasional pasca perang dan sesuai dengan hukum internasional dan catatan sejarah.

Dengan adanya pernyataan hal tersebut, China juga menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan bagian dari wilayahnya sejak abad ke – 19 era Dinasti Ming, dan sebelum Kepulauan Senkaku/Diaoyu jatuh kepada Jepang, China menyatakan bahwa Kepulauan tersebut sudah menjadi bagian dari kepulauan yang kini bernama Taiwan yang merupakan bagian dari kekuasaan China, oleh karena itu setelah Taiwan dikembalikan kepada China melalui perjanjian Okinawa, China berpendapat bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu juga harus dikembalikan, apabila Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak dikembalikan hal tersebut mendorong China untuk berpendapat bahwa Jepang mengakusisi dan memanfaatkan Perjanjian Shimonoseki tahun 1895, yang berisi atas kekalahan pihak China dengan memberikan kekuasaan Taiwan pada Jepang.(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020)

Awal dari diplomasi antar kedua negara ini terjadi melalui bentuk kerja sama dalam bidang eksplorasi minyak di Kepulauan Senkaku/Diaoyu namun diplomasi yang kerap gagal dan kerja sama yang berakhir karena berbagai kontradiktif kepentingan satu sama lain. Hingga pada tahun 2012 menjadi salah satu puncak dari memanasnya hubungan antar keduanya terkait problematika sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu ini, melalui tindakan Perdana Menteri Jepang yang secara resmi menasionalisasikan tiga dari empat Kepulauan Senkaku/Diaoyu, atas hal tersebut meningkatkan ketegangan antara Jepang dan China. Respon China keberatan dengan pernyataan Jepang sehingga dari hal tersebut bereaksi pada perselisihan kedua negara dalam aspek militernya, terutama untuk China yang mendeklarasikan ADIZ (*Air Defence Identification Zone*) untuk melakukan patroli udara memasuki sekitar perairan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020)

Tindakan kebijakan Jepang dalam merespon atas tindakan militer yang China lakukan di Laut China Timur hingga pada tahun 2014, yang membuat Jepang geram dengan melakukan upaya *hard diplomacy* melalui pernyataan Kementrian Luar Negerinya, Jepang menyatakan bahwa klaim yang dilakukan China tidaklah berdasar dan China tidak memiliki kontrol nyata

untuk membuktikan bahwa wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai kedaulatannya apabila hanya berdasar pada penemuan dari pendekatan sejarah saja. Setelah itu Jepang mulai mengangkat kebijakan strategi keamanan nasionalnya yang akan berfokus pada peningkatan armada udara dan laut dengan melakukan berupa pengeluaran anggaran militer terbesarnya, Jepang juga terus meningkatkan konsentrasinya pada aspek tersebut hingga tahun 2016 berlangsung. Baik Jepang dan China tidak henti saling merespon tindakan satu sama lain terkait klaim teritorial Kepulauan Senkaku/Diaoyu ini.(Pramiswara, 2017)

Ketegangan kembali meningkat pada tahun 2020, yang dipicu oleh pihak pemerintah Jepang terkait pengesahan berupa undang – undang untuk mengubah nama wilayah Tonoshiro menjadi Tonoshiro Senkaku, sehingga China menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan illegal dan provokasi serius melalui. Kementrian Luar Negerinya, China memperingatkan Jepang dengan melakukan tindakan berupa pengawasan di Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh militer China, kapal penjaga China kerap memasuki area perairan tersebut. Hingga membuat Jepang menyampaikan peringatan keberatan atas yang dilakukan China, namun pemerintah China sekali lagi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Jepang lebih memprovokasi dan China akan dengan serius mempertahankan wilayah yang dianggap kedaulatannya melalui pernyataannya itu. hal tersebut ditandai dengan kegiatan armada China yang turut berpatroli secara terang – terangan diwilayah perairan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.(Arbar Fathanah Thea, 2020)

Sehingga Jepang mengeluarkan upaya berupa kebijakan untuk merespon *hard diplomacy* dari China dengan meningkatkan kerja sama pertahanan militernya bersama AS. Hal tersebut mengingat pasalnya AS memiliki perjanjian pertahanan bersama Jepang, dan disisi lain atas aliansi tersebut AS sendiri telah bersitegang dengan China dalam banyak hal. Hingga pada tepatnya Januari 2023 Jepang dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi dalam

tingkatkan hubungan pada aspek pengembangan dan pencanggih kekuatan militer untuk menghadapi ancaman China di Laut China Timur.(Jati, 2023)

Berdasarkan dari pernyataan diatas kita mengetahui bahwa pada era kedaulatan modern ini, konflik persengketaan yang terjadi antara Jepang dan China tersebut tentunya akan menjadi suatu aspek yang membawa dampak bagi keduanya dalam berbagai sektor seperti ketegangan politik, ketidakstabilan ekonomi, serta hingga memasuki dampak keamanan regional. melihat China yang dengan respon agresif terhadap klaim kepulauan Senkaku/Diaoyu, membuat Jepang harus meningkatkan upaya dalam pertahanan yang dianggap sebagai wilayah kedaulatannya. Hingga dengan melakukan upaya dalam berbagai bentuk diplomasinya demi mencegah eskalasi dampak untuk negara dan kedaulatannya. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait problematika upaya Jepang dalam mempertahankan kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis menentukan rumusan masalah yaitu **“Bagaimana Upaya Diplomasi Jepang dalam Mempertahankan Kepulauan Senkaku/ Diaoyu dari China”**

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan merujuk pada kasus penelitian yang diangkat oleh penulis, terhadap pembahasan ini dengan melihat bentuk latar belakang masalah yang luas dan sumber yang terbatas, penulis perlu membatasi pada pembahasan terkait penelitiannya. Yang akan lebih

fokus pada titik bahasan yang telah ditentukan terkait dinamika upaya Jepang dalam kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari China.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan di penelitian ini penulis memiliki tujuan serta kegunaan penelitian yang bermanfaat bagi para pembaca. Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dinamika sengketa Kepulauan Senkaku/ Diaoyu antara Jepang dan China.
2. Untuk mengetahui apa kepentingan nasional Jepang terhadap Kepulauan Senkaku/ Diaoyu.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Jepang terhadap China dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku/ Diaoyu.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun pada kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis pada penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Jepang dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku melalui kebijakan diplomasinya yang mana Kepulauan Senkaku merupakan bagian yang dianggap sebagai kedaulatannya secara resmi namun China tidak menganggap demikian sehingga terjadinya persengketaan antar keduanya. Dan apa saja yang menjadi tantangan serta hambatan bagi Jepang dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku dari China.

2. Kegunaan praktis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
- a) Sebagai suatu syarat serta tanggung jawab untuk menempuh program studi S1, dengan membuat suatu karya tulis ilmiah pada program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung.
 - b) Dapat memberi manfaat melalui pemahaman yang dikaji guna memperluas pada aspek pengetahuan baik bagi penulis, akademisi, serta masyarakat umum.
 - c) Dengan adanya penelitian karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menjadi bentuk referensi bagi sumber literatur dimasa mendatang oleh para penulis selanjutnya, khususnya bagi para studi Hubungan Internasional yang berkaitan pada penelian karya ilmiahnya.